

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2019

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	INSTANSI : Biro Infrastruktur dan SDA
KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan Dan Perikanan	BAGIAN : Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian
ANGGARAN : Rp. 450.000.000,-	

## 1. LATAR BELAKANG.

Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang sangat strategis, karena disamping berbatasan dengan provinsi lain, Jawa Tengah juga diapit oleh Laut Jawa di sebelah Utara dan Samudera Hindia di sebelah Selatan, dengan panjang pantai 656,1 km. Dengan demikian memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan ini mempunyai kontribusi dalam perekonomian di wilayahnya. Secara sosial ekonomi sumberdaya ini memberikan multiplier efek yang cukup besar, antara lain : penyerapan tenaga kerja bagi para nelayan, sumber devisa, dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Saat ini jumlah nelayan yang bergerak di usaha perikanan tangkap di laut Jawa Tengah sebanyak 160.396 orang, dengan infrastruktur pendukung antara lain : Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, 9 (sembilan) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 77 buah Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah.

Sedangkan fakta menunjukkan bahwa perikanan tangkap masih didominasi oleh skala kecil yang menjadi ciri dominan bagi perikanan tangkap di Jawa Tengah. Sebagian besar armada perikanan tangkap (81,23%) merupakan motor tempel berukuran kurang dari 10 GT berjumlah 15.026 unit, sehingga kemampuan jangkauan penangkapannya tidak bisa jauh atau hanya di sekitar pantai (jalur I). Terkonsentrasinya usaha penangkapan di sekitar pantai ini berakibat pada munculnya berbagai permasalahan, diantaranya : persaingan diantara sesama nelayan, potensi rawan konflik antar nelayan yang disebabkan perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*), kerusakan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan disebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Polemik alat tangkap cantrang yang dilarang di Indonesia tertuang pada surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) dan Surat Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI. Alasan dari penerapan aturan ini adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan, dalam Permen tersebut menjelaskan nelayan wajib mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya ikan. lalu seperti apa alat tangkap cantrang itu?

Pengembangan perekonomian masyarakat pesisir juga memerlukan perhatian khusus utamanya terhadap petambak garam dalam rangka mendorong tercapainya swasembada garam nasional. Garam merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai strategis karena sangat dibutuhkan baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun untuk industri. Pada konsumsi, garam dimanfaatkan untuk rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Sedangkan pada industri, garam digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong untuk industri seperti : industri penyamakan kulit, industri tekstil, industri pulp, industri soda, industri kosmetik dan lain sebagainya.

Produksi garam di Jawa Tengah yang meliputi 5 (lima) Kabupaten yaitu Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang mencapai 307.249,18 ton dan posisi 5 (lima) tahun terakhir tertinggi pada tahun 2015 mencapai 841.543,56 ton itupun belum dapat mencukupi rata-rata kebutuhan garam di Jawa Tengah utamanya kebutuhan garam untuk farmasi (100% impor). Data kebutuhan garam tahun 2017 meliputi : garam halus 1.832.695,90 kg/tahun, garam bata 18.096,00 kg/tahun, garam kristal 156.000,00 kg/tahun, garam krosok 4.430.970,00 kg/tahun sedangkan garam farmasi 2.088,36 kg/tahun (100% impor) total 6.439.850,16 kg/tahun, oleh sebab itu untuk mendorong kecukupan kebutuhan garam di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi berupaya mendirikan pabrik garam di sentra-sentra produksi garam.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berdampak pada permasalahan terhadap para nelayan dan menurunnya produksi dan produktivitas di sektor kelautan dan perikanan secara signifikan, maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan.

## **2. Maksud**

Maksud dilaksanakannya kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan adalah dalam rangka mendukung tercapainya kegiatan strategis di Provinsi Jawa Tengah.

## **3. Tujuan kegiatan tersebut adalah :**

1. Melaksanakan monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;

## **4. LOKASI DAN SASARAN KEGIATAN**

Lokasi dan Sasaran kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah, Pemerintah Pusat (Kementerian terkait), SKPD terkait Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta stakeholder pelaksana kegiatan perikanan dan kelautan.

## 5. RUANG LINGKUP KEGIATAN.

NO	TAHAP KEGIATAN	RINCIAN	KET
1.	Persiapan	a. Penyusunan RKO b. Persiapan pelaksanaan	
2.	Pelaksanaan	a. Monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan b. Konsultasi dan koordinasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	
3.	Pelaporan	Penyusunan laporan monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	

## 6. JADWAL KEGIATAN.

NO	SUB KEGIATAN	WAKTU (BULAN)
1.	Persiapan : a. Penyusunan RKO b. Persiapan pelaksanaan	Januari – Februari 2019
2.	Pelaksanaan a. Monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan b. Konsultasi dan koordinasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	Maret - November 2019
3.	Pelaporan Penyusunan laporan monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	Desember 2019

## 7. ANGGARAN :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

## 8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019, sehingga keluaran yang dihasilkan dapat mendukung capaian program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2019

KEPALA BIRO ISDA

Dra. PENI RAHAYU, MSi  
NIP. 19620921 198903 2 005